BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat suatu negara dapat diketahui dari distribusi pendapatan nasional. Pemerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat akan menciptakan pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi , mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan , dan sebagainya. Sebaliknya, perbaikan untuk tujuan pembangunan ekonomi tidak akan terwujud jika distribusi pendapatan tidak meraata yang menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Distribusi (*dullah*) secara bahasa dalam Al Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7, berarti "perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum". Kata tersebut juga berarti harta yang terus diputar (di distribusikan). Sedangkan menurut istilah mengandung arti "pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain". (Taqiyuddin an-Nabhani, 1996). Distribusi menurut teori ekonomi modern merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi (Mannan, 1995). "Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja" (Afzalurrahman, 1996). Beberapa teori distribusi

diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat.

Pendapatan per kapita yang tinggi di suatu negara bukan jaminan semua penduduknya hidup makmur. Sebaliknya, negara yang pendapatan perkapitanya rendah tidak berarti semua penduduknya hidup dalam kemiskinan, namun ada sebagian yang hidup kaya. Ada dua alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu dengan menggunakan koefisien GINI dan menggunakan kriteria bank dunia.

1. Koefisien GINI

Koefisien GINI adalah koefisien atau angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Besar koefisien GINI dimulai dari 0 sampai dengan 1. Jika koefisien GINI sama dengan 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata dengan sempurna (dengan kata lain tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan). Sebaliknya, jika koefisien GINI sama dengan 1, berarti distribusi pendapatan tidak merata secara sempurna, karena hanya satu pihak yang menerima keseluruhan dari pendapatan nasional. Selanjutnya, jika nilai koefisien GINI mendekati 0, berarti distribusi pendapatan semakin merata. Akan tetapi, jika mendekati angka 1 berarti distribusi pendapatan semakin tidak merata. Agar lebih jelas, perhatikan tabel berikut:

Tabel 2
Daftar kelompok Nilai Koefisien GINI

Nilai Koefisien (X)	Distribusi Pendapatan
X= 0	Merata sempurna
X< 0 < 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 < X < 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
0,5 < X < 1	Tingkat ketimpangan tinggi
X = 1	Tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak)

Sumber: WDI diakses 18 /8/2018

Indeks GINI secara konvensional dirumuskan sebagai berikut :

$$G = \sum_{t-1}^{n-1} n_{t+1}\pi_t - \sum_{t-1}^{n-1} n_t\pi_{t+1}$$

Dimana nt adalah pangsa kumulatif pendapatan dan πt adalah pangsa kumulatif penduduk. Salah satu yang menarik dari indeks GINI adalah pendekatannya yang sangat langsung terhadap ukuran ketidakmerataan, memuat perbedaan diantara setiap pasangan pendapatan, yang sejauh ini merupakan ukuran ketidakmerataan ekonomi yang paling populer (Mudrajad, 2007). Selanjutnya, koefisien GINI dambarkan dengan kurva Lorenz:

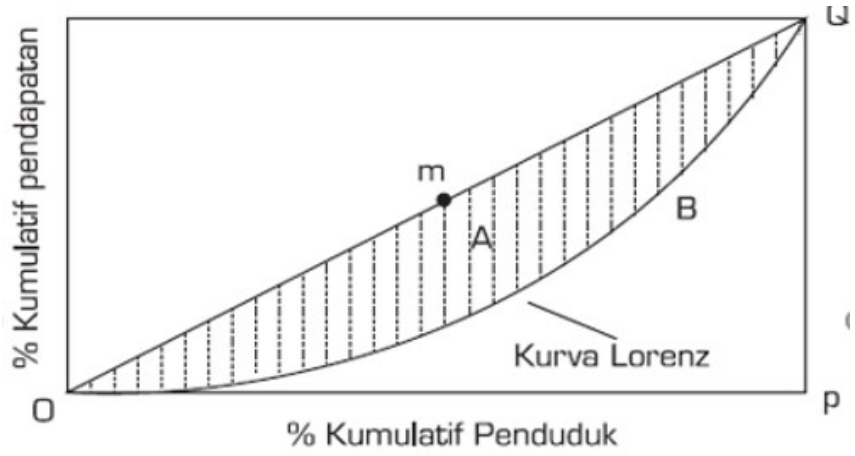

Gambar 1
Kurva Lorenz

Keterangan:

Garis **OQ** yang diagonal disebut "Garis Kemerataan Sempurna" karena tiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase pendapatan yang sama dengan persentase penduduk. Misalnya, titik **m** menunjukkan bahwa 50% dari pendapatan didistribusikan tepat untuk 50% jumlah penduduk.

Koefisien GINI diperoleh dengan rumus:

$$Koefisien\ GINI = \frac{Luas\ bidang\ A}{Luas\ bidang\ B}$$

Indeks GINI seringkali ditampilkan bersamaan dengan kurva Lorenz, yang menggambarkan hubungan antara pangsa kumulatif pendapatan dan penduduk. G adalah indeks GINI yang diturunkan dari kurva Lorenz dengam cara membagi daerah yang dibatasi oleh garis diagonal dan kurva Lorenz dengan total daerah pada segitiga yang lebih rendah, yakni:

$$G = \frac{daerah\ di\ antara\ AC\ dan\ ABC}{seluruh\ daerah\ ACD}$$

Perlu di ketahui bahwa kadang-kadang Indeks GINI ditunjukkan dalam bentuk persentase, seperti yang biasa digunakan oleh Bank Dunia. Dalam hal ini secara sederhana kita tinggal mengalikan Indeks GINI dengan 100. Koefisien GINI digunakan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan kotor sebelum redistribusi dan laba bersih setelah redistribusi.

2. Kriteria Bank Dunia

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, Bank Dunia melihat dari besarnya kontribusi (sumbangan) dari 40% penduduk termiskin

terhadap keseluruhan pendapatan nasional. Klasifikasi kriteria yang dipakai adalah sebebagai berikut

Tabel 3
Klasifikasi Kriteria Bank Dunia

No.	Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan
1	40 % penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dai 12% bagian pendapatan	Tinggi
2	40 % penduduk berpenghasilan terendah menerima 12% hingga 17% bagian pendapatan	Sedang
3	40 % penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 % bagian pendapatan	Rendah

2.1.2 GDP Perkapita

Produk domestik bruto (PDB) atau biasa disebut *Gross Domestik Bruto* (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. GDP merupakan Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

2.1.3 Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan

spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

2.1.4 Perdagangan Internasional

Menurut Boediono (2014) perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan dalam arti khusus mempunyai implikasi yang sangat fundamental bahwasanya perdagangan hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan dan tidak ada pihak lain yang (merasa) dirugikan. Bahkan apabila mengikuti kaum klasik dan neoklasik, perdagangan bebas atau free trade akan memberikan manfaat tambahan yang maksimal..

Motif bagi orang yang melakukan tukar-menukar adalah adanya kemungkinan diperolehnya manfaat tambahan (*gains from trade*). Perbedaan selera atau pola konsumsi menjadi sebab timbulnya pertukaran antara dua orang atau negara. Namun para ahli ekonomi umumnya sekarang berpendapat bahwasanya penyebab fundamental terjadinya perdagangan antara dua negara bukan terletak pada sisi konsumsi, tetapi pada sisi produksi. Perdagangan

internasional timbul karena suatu negara bisa menghasilkan barang secara lebih efisien dibandingkan dengan negara lain (Boediono, 2014).

Menurut Todaro dan Smith (2006), perdagangan bebas seringkali dikatakan sebagai mesin pertumbuhan yang memacu pembangunan ekonomi negara-negara yang sekarang maju selama abad kesembilan belas dan awal abad keduapuluh. Namun keadaan banyak berubah saat ini. Negara-negara berkembang bukan pengekspor minyak dan negara pengekspor minyak mengalami kesulitan serius dalam usaha mempercepat ekonomi melalui perdagangan dunia.

2.1.5. Sektor Keuangan

Sektor keuangan adalah seperangkat lembaga, instrumen, pasar, serta kerangka hukum dan peraturan yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan cara memperluas kredit (World Bank, 2018). Pada dasarnya, perkembangan sektor keuangan adalah membahas bagaimana cara mengatasi biaya yang timbul pada sistem keuangan. Proses pengurangan biaya memerlukan cara dengan metode memperoleh informasi, melaksanakan kontrak, dan membuat transaksi yang akan menghasilkan kontrak keuangan, pasar, dan perantara. Berbagai jenis dan gabungan informasi, pelaksanaan, serta biaya transaksi bersama dengan sistem hukum, peraturan, dan pajak yang berbeda telah memotivasi kontrak keuangan, pasar, dan penengah yang berbeda pula di seluruh negara dan sepanjang sejarah.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan lembaga-lembaga keuangan yang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan aset-aset keuangan. *Financial inclusion* merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh

dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat. Global Financial Development Report (2014) mendefinisikan *Financial Inclusion* sebagai "*The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.*'' *Financial Inclusion* merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.

Dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan ialah menjalankan fungsi intermediasi, bank dapat menyalurkan pinjaman kepada semua kalangan. Sebelumnya, kalangan orang kaya saja yang hanya dapat melakukan pinjaman bank, karena diakui dapat membayar pinjaman tersebut dan karena mereka mempunyai agunan. Sedangkan kalangan orang miskin tidak dapat melakukan pinjaman bank, karena dianggap tidak dapatmembayar pinjaman tersebut dan tidak mempunyai agunan. Namun, dengan berkembangnya sistem keuangan yang dikelola dengan baik, semua kalangan dapat melakukan pinjaman bank tersebut, sehingga mereka dapat mengelola modal yang di dapat dengan baik.

2.1.5.1 Pembiayaan Syariah

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Rivai dan Arifin, 2010). Dengan kata lain,

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang - Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Antonio (2001), berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk kebutuhan.

Antonio (2001) menambahkan bahwa menurut keperluannya, pembiayaan produktkif dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan kegunaan suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal

guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan berjangka waktu yang cukup lama. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah pada umumnya menggunakan skema *mudharabah* ataupun *musyarakah*.

Menurut Antonio (2001), dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat karena dalam Islam, pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya bila seorang meminjam sesuatu maka ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammmad SAW yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.

Para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*). Pada saat pemberian pembiayaan, pihak perbankan syariah juga menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan. Adapun syarat-syarat untuk sebuah pembiayaan menurut Antonio (2001) adalah:

1. Surat permohonan tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat ijin umum perusahaan dan tanda tangan daftar perusahaan.

3. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotokopi rekening bank.

2.1.5.2. Kredit Domestik Kepada Sektor Swasta

Kredit domestik kepada sektor swasta adalah sumber keuangan yang berupa pinjaman dan efek non-ekuitas disediakan ke sektor swasta oleh lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan keuangan lainnya. Kredit domestik kepada sektor swasta diukur sebagai (% PDB). Semakin tinggi ukuran ini, semakin tinggi sumber daya keuangan atau pembiayaannya bagi sektor swasta di suatu negara dan semakin besar peluang bagi sektor swasta untuk berkembang (World Bank, 2017).

2.1.6. Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan

1. GDP Perkapita

GDP perkapita digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznets Hypothesis. Yaitu, ketika pertumbuhan ekonomi masih rendah, kenaikan pendapatan perkapita akan menaikkan ketimpangan pendapatan sampai pada tingkat pendapatan tertentu. Setelah tingkat pendapatan tercapai kenaikan, pendapatan perkapita akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Adapun Hipotesis Kuznets ini bila dambarkan akan nampak seperti pada Gambar 2, sebagai berikut:

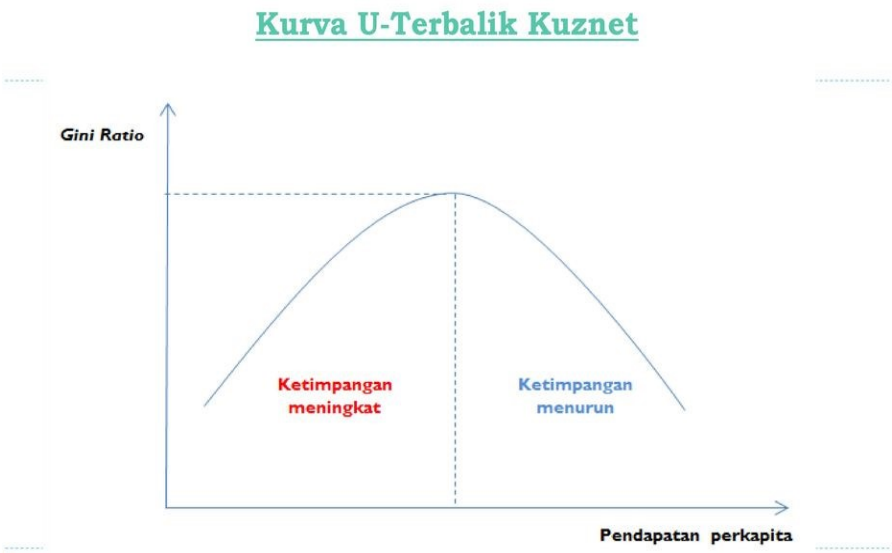

Gambar 2
Kurve "U" Terbalik (Hipotesis Kuznets)

2. Inflasi

inflasi adalah suatu kondisi dimana terjadi kenaikan harga secara umum dan terus menerus, inflasi yang stabil dan terkendali merupakan stimulus bagi perekonomian untuk tumbuh. Tingkat inflasi yang tinggi menurut Mankiw (2003) akan menyebabkan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi akhirnya akan menurunkan keseimbangan uang riil. Inflasi juga akan menimbulkan inefisiensi ekonomi. Tingkat harga yang berubah membuat rencana keuangan individu menjadi tidak pasti, inflasi yang tidak diharapkan memiliki dampak negatif yang lebih parah dari biaya inflasi yang diantisipasi.

Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian itu tidak stabil dan tinggi maka akan berdampak buruk terhadap perekonomian dikarenakan inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli bagi masyarakat. Di sisi lain, inflasi dapat menumbuhkan pasar tenaga kerja, pemotongan upah nominal sulit dilakukan tetapi hal itu bisa dilakukan dengan membiarkan inflasi melakukannya, inflasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan pasar tenaga kerja adalah inflasi rendah.

Susanti dkk (2007), menyatakan bahwa tingkat harga merupakan biaya bagi masyarakat dalam memegang aset dalam bentuk riil dibanding aset finansial jika tingkat harga lebih tinggi. Inflasi tinggi dapat menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan, berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi, terjadinya defisit dalam neraca perdagangan, dan timbulnya ketidakstabilan politik.

Selain itu menurut Cardoso (1993), inflasi juga akan berdampak bagi ketimpangan distribusi pendapatan. Meskipun demikian sebenarnya pernyataan tersebut sangat bergantung pada kondisi awal inflasi rendah, maka pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan negatif, sedangkan jika kondisi awal inflasi tinggi maka pengaruhnya menjadi positif.

Adanya inflasi cenderung akan mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Karena tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Inflasi akan menyebabkan penurunan jumlah riil. Hal ini kemudian menyebabkan distribusi pendapatan yang semakin timpang

3. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional (*Trade*) merupakan penjumlahan volume ekspor dan impor. Ekspor secara luas ke berbagai negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomiannya. Sedangkan melalui impor maka negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi didalam negri atau memanfaatkan pola *comparative advantage* sehingga biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk barang dan jasa akan lebih murah

Hubungan perdagangan akan menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju. Pembebasan dan perluasan pasar sering memberikan keuntungan daya saing pada industri di sentra-sentra pengembangan yang mapan. Keterbukaan perdagangan internasional meningkatkan hasil dari faktor produksi yang relatif berlimpah dan mengurangi kembalinya faktor produksi yang relatif langka. Oleh karena itu, Negara dengan tenaga kerja yang melimpah akan mampu mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, karena dengan meningkatnya sektor ekspor – impor akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran dimana hal ini dapat mendorong kemerataan distribusi pendapatan.

4. Pembiayaan Syariah

Salah satu tujuan dari pembiayaan adalah membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor – sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini

berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru, sehingga ketimpangan pendapatan akan menurun.

5. Kredit Domestik Kepada Sektor Swasta

Rasio Kredit domestik adalah perbandingan jumlah seluruh kredit dalam satu negara secara *aggregate* dari sektor *non-financial* berbanding dengan GDP. Pemberi kredit berasal dari sektor finansial ataupun non-finansial. Tujuannya untuk melihat seberapa besar resiko yang dihadapi apabila kredit tadi macet. Sistem perbankan dan sistem keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan dan merupakan faktor utama dalam pengentasan kemiskinan. Pada tingkat rendah bank komersial dalam pembangunan ekonomi cenderung mendominasi sistem keuangan, sementara pada tingkat yang lebih tinggi pasar saham domestik cenderung menjadi lebih aktif dan efisien. Ukuran dan mobilitas arus modal internasional membuatnya semakin penting untuk memantau kekuatan sistem keuangan. Sistem keuangan yang kuat dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan, sehingga akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

2.2 Kajian Pustaka

Ada banyak literatur tentang hubungan antara perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi, baik secara teoritis maupun empiris. Namun masih belum banyak ditemukan penelitian yang meneliti hubungan antara perkembangan keuangan dengan ketimpangan pendapatan dan ataupun secara khusus membahas keduanya dengan studi kasus di negara-negara Islam.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Mohsen dan Ruixin (2014), memperlihatkan mengenai dampak dari perkembangan sektor keuangan terhadap

distribusi pendapatan dengan menggunakan data *time-series* dengan metode regresi ECM. Dalam penelitian ini Mohsen dan Ruixin melakukan penelitian terhadap ketimpangan pendapatan dibeberapa negara berbeda. Perkembangan pasar keuangan dikatakan memiliki beragam pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Penelitian terdahulu yang dilakukan dengan metode panel menunjukkan hasil yang beragam. Untuk menganalisis secara lebih rinci mengenai pengaruh perkembangan keuangan dengan menggunakan data *time-series*, Mohsen dan Ruixin menggunakan tingkat kredit private atas GDP dan rasio aset bank atas GDP sebagai variabel untuk menguji mekanisme kredit. Sedangkan, untuk menguji likuiditas, Mohsen dan Ruixin menggunakan rasio jumlah uang beredar atas GDP dan deposit sistem keuangan atas GDP. Mohsen dan Ruixin menyertakan variabel makroekonomi berupa GDP perkapita, *CustomerPrice Index*, perdagangan internasional yang dilihat dari impor dan ekspor serta pengeluaran pemerintah sebagai variabel pengontrol. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa, perkembangan sektor keuangan memiliki efek jangka pendek terhadap distribusi pendapatan di negara-negara yang digunakan sebagai sample. Namun efek yang ada cukup beragam, di Australia semua koefiseien jangka pendek berpengaruh signifikan negatif mendukung *equalizing effect*. Berbeda dengan yang terjadi di Bolivia dimana perkembangan sektor keuangan cenderung memiliki *unequalizing effect* dalam jangka pendek.

Ravindra (2017) dalam penelitiannya yang membahas dampak faktor makroekonomi dan ketimpangan pendapatan di negara Asia, yaitu dengan menggunakan *Generalized Method of Moments* (GMM), diperoleh hasil bahwa

dalam jangka panjang GDP memiliki hubungan negatif yang mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi dan trade memiliki hubungan positif dan pengangguran memiliki hubungan negatif terhadap indeks GINI.

Penelitian teoritis lain yang membahas hubungan perkembangan keuangan dengan ketimpangan pendapatan khusus di negara-negara Islam yang dilakukan oleh Hidayatullah Muttaqin (2011), menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun baik ditinjau dari sisi kelompok pendapatan maupun dari aspek kelompok geografis, antara negara-negara Islam yang terkategori kelompok berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah, dan di antara kawasan Timur Tengah dengan Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan di 47 negara Islam sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan di semua wilayah geografis di mana pendapatan 20% penduduk dengan pendapatan paling tinggi mencapai 4 sampai 26 kali lipat pendapatan 20% penduduk dengan pendapatan paling rendah. Kondisi tersebut menunjukkan sistem ekonomi dan pembangunan yang diterapkan justru menyebabkan ketimpangan.

James dan Jiangyan (2012) melakukan penelitian mengenai kaitan inflasi dan ketimpangan. Dalam penelitian ini, James dan Jiangyan mengklasifikasikan inflasi kedalam dua kategori yaitu inflasi non-pangan dan inflasi pangan. Kedua kategori inflasi tersebut merupakan variabel independen yang diteliti pengaruhnya terhadap variabel dependen berupa ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam penelitian ini, James dan Jiangyan menggunakan metode analisis data berupa

Generalized Method of Moments (GMM). Diperoleh hasil analisis bahwa baik inflasi pangan maupun inflasi non-pangan memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan di 3 negara sampel yang berbeda.

Urata dan Narjoko (2017) melakukan penelitian mengenai perdagangan internasional dan ketimpangan pendapatan, yaitu dengan menggunakan regresi panel. Urata dan Narjoko menganalisis efek globalisasi, secara partikular dalam bentuk perdagangan internasional terhadap ketimpangan pendapatan dari berbagai perspektif. Diperoleh hasil analisis bahwa trade atau perdagangan internasional memiliki hubungan negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan dalam perdagangan internasional dinegara berkembang mampu memberikan kontribusi untuk menekan angka ketimpangan pendapatan. Efek dari peningkatan perdagangan internasional atau liberalisasi perdagangan terhadap ketimpangan disuatu negara adalah ambigu. Di beberapa kasus, liberalisasi perdagangan internasional mampu mengurangi ketimpangan dan begitu juga sebaliknya.

Sami dan RuiXin (2016) melakukan penelitian mengenai hubungan antara perkembangan keuangan dan distribusi pendapatan, bahwa hasilnya adalah *Financial development*, GDP, *government expenditure* dan perdagangan internasional memiliki hubungan negatif dengan indeks GINI sedangkan inflasi memliki hubungan positif yang memperburuk ketimpangan pendapatan disuatu wilayah.

Sebastian Jauch dan Sebastian Watzka (2015) menganalisis hubungan perkembangan keuangan dan ketimpangan pendapatan pada negara maju dan

berkembang. Dalam penelitiannya menggunakan GMM (*Generalized Method of Moments)* sebagai alat analisis, dan hasilnya diperoleh Perkembangan keuangan dan inflasi meningkatkan ketimpangan pendapatan, GDP dan sektor pertanian menurunkan ketimpangan pendapatan,

Simplice (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh sektor keuangan terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Afrika. Dalam penelitian ini digunakan *Ordinary Least Squares* atau OLS sebagai model regresi untuk mengestimasi data yang diperoleh. Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa perkembangan sektor keuangan formal mampu mengurangi adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Sementara itu dalam sistem keuangan Islam, penelitian empiris sejauh ini yang telah dilakukan untuk menganalisis tingkat efisiensi, superioritas dan stabilitas bank-bank Islam dibandingkan bank-bank konvensional untuk mencapai target fungsi intermediasi moneter yang difokuskan pada pencapaian kesinambungan pertumbuhan riil ekonomi, penurunan inflasi dan pengangguran. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem keuangan yang tidak menggunakan bunga (*interest-free banking system*) adalah lebih unggul dalam mencapai target moneter (lihat Darrat, 1988). Sementara itu Yousefi dkk (1997) dan Yusuf dan Wilson (2005) menemukan bahwa tidak ada bukti secara empiris yang menunjukkan keunggulan dan stabilitias sistem bank non-riba dibandingkan dengan bank yang menggunakan riba (*interest based banking system*).

Selanjutnya, Hafas dan Mulyani (2009) dalam penelitiannya tentang kontribusi perbankan Islam terhadap perekonomian Malaysia menemukan adanya

hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank-bank Islam. Penelitian secara empiris yang membahas secara spesifik hubungan sektor keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas sekali.

Adapun penelitian Lulita Sari (2018) yang meneliti mengenai hubungan perkembangan sistem keuangan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di tiga negara, yaitu, Indonesia, Argentina dan Switzerland. Dimana variabel penelitian meliputi PDB, IHK, Perdagangan Internasional, Aset Bank sentral, dan Jumlah uang beredar mendapatkan hasil, bahwa hampir semua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ketimpangan distribusi pendapatan baik di negara Switzerland, Argentina maupun Indonesia, hanya variabel aset bank sentral sebagai salah satu indikator perkembangan sistem keuangan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di negara Switzerland dan Argentina

Studi yang dilakukan oleh Kus (2012) tentang finansialisasi dan ketimpangan pendapatan di negara-negara OECD. Dengan menggunakan data 1995-2007 dari 20 negara OECD, hasil temuan Kus (2012) mengindikasikan bahwa finansialisasi terbukti berkontribusi secara positif terhadap kenaikan ketimpangan pendapatan. Kus (2012) juga menemukan bahwa pada negara yang memilki serikat buruh yang lemah, efek finansialisasi cenderung lebih kuat dalam meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang negara dengan serikat buruh yang lebih kuat. Hasil penelitian yang lebih terkini seperti Dunhaup (2014) juga mengkonfirmasi temuan ketiga hasil kajian sebelumnya yakni finansialisasi

memainkan peran yang penting dalam meningkatkan ketimpangan di negara-negara maju.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun gambaran sederhana penelitian ini ditunjukkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut :

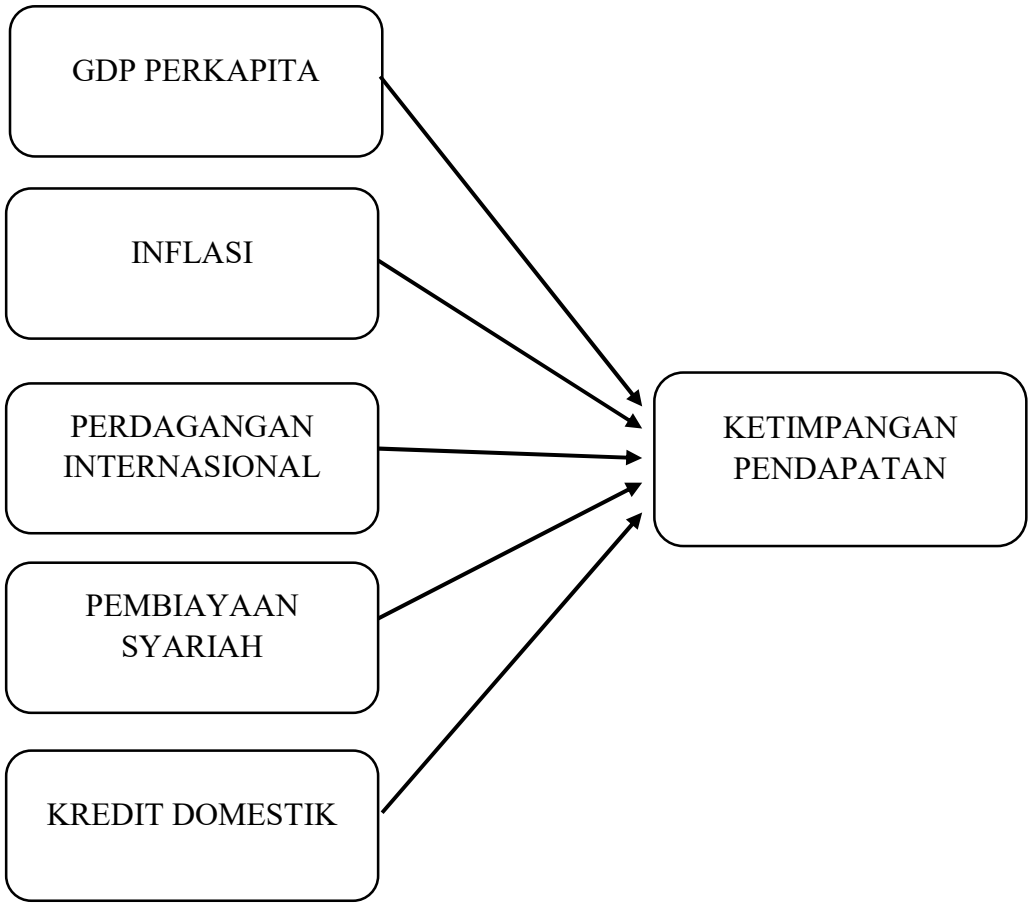

Gambar 3
Pengaruh Faktor Makroekonomi dan Perkembangan Keuangan terhadap ketimpangan Pendapatan

Hipotesis

H1 = Diduga GDP perkapita berpengaruh negatif tehadap ketimpangan pendapatan pada negara Islam.

H2 = Diduga Inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatanpada negara Islam.

H3 = Diduga Perdagangan Internasional berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada negara Islam

H4 = Diduga Pembiayaan syariah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada negara Islam

H5 = Diduga Kredit domestik berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada negara Islam